

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja 2020 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun dengan berpedoman pada revisi Renstra, hasil evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun Renja 2020 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pemerintah Provinsi.

Rencana Kerja 2020 berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor. 050/12/I/Ren.Makro/Bappeda-2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang penyusunan Rencana Kerja 2020 Perangkat Daerah Tahun 2020, maka dilakukan penyusunan Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada Revisi Renstra Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja 2020 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yaitu rancangn awal Renja yang dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat memuat informasi tentang tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja dan rencana capaiannya terhadap program dan kegiatan.

Proses penyusunan Rencana Kerja 2020 ini berdasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara kontiniu telah dilakukan sebelumnya melalui rapat-rapat koordinasi, identifikasi kebutuhan perusahaan atau kunjungan lapangan dengan stakeholder terkait. Oleh karena itu secara substantif dokumen perencanaan ini mengintegrasikan dan menyelaraskan program-program Pemerintah Pusat, program-program Kabupaten/Kota dan kegiatan-kegiatan sesuai kebutuhan di lapangan.

Penyusunan Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

–Tahap persiapan meliputi :

- Pembentukan Tim Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
- Penyusunan Rencana Kerja 2020 serta penyiapan data dan informasi.

– Tahapan perumusan rancangan Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

– Tahapan penyajian rancangan Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

- a. Keterkaitan antara Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan dokumen RKPD, Renstra , Renja K/L dan Renja Kab/Kota.

Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat disusun berpedoman kepada RKPD, revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pada Misi 4 “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah” dan pada Prioritas ke 8 yaitu “Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Serta Penanganan Daerah Tertinggal,”

b. Tindak lanjut dengan penyusunan RAPBD.

Melalui program dan kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja 2020 ini dan komitmen semua pihak diharapkan mampu menekan penurunan tingkat pengangguran dan penanganan daerah tertinggal ke depan yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Ditengah kondisi daerah yang belum maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini ditandai antara lain dengan kualitas angkatan kerja kita masih cukup rendah terlihat bahwa 36,51 persen dari angkatan kerja masih didominasi berpendidikan SD ke bawah. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan kewirausahaan (enterpreneur) bagi angkatan kerja, sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja baru.

Disamping pembangunan ketenagakerjaan, pembangunan ketransmigrasian juga merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Nasional, dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan permukiman yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan, pengerahan dan penempatan serta pengembangan warga transmigrasi dan masyarakat sekitar bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya tata kelola organisasi
2. Meningkatkan kesempatan kerja
3. Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat di kawasan Transmigrasi

## **1.2. Landasan Hukum.**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja OPD, antara lain :

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
8. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor.050/114/Set/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Revisi Renstra) Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
9. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor.050/1141/Ren.Makro/Bappeda-2017 tanggal 30 November 2017 tentang Perubahan Renstra OPD
10. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor.050.1157/XII/RENMAKRO/Bappeda-2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja 2020 Perangkat Daerah Tahun 2019.
11. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor.050/12/I/ Ren.Makro/Bappeda-2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang penyusunan Rencana Kerja 2020 Perangkat Daerah Tahun 2020.
12. Pergub Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 13 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-668-2015 tentang Standar Biaya
14. Peraturan Gubernur Nomor.111 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Disnakertrans Prov. Sumbar.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud menyusun Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan untuk jangka periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah

1. Menjabarkan perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 dan Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
2. Menyelaraskan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan program Kab/Kota, usulan-usulan pada forum Musrembang yang dilakukan secara berjenjang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sbb :

##### **I. PENDAHULUAN**

a. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Disnakertrans , Proses penyusunan Renja Disnakertrans, keterkaitan antara Renja Disnakertrans dengan dokumen RKPD, Renstra Disnakertrans, dengan Renja K/L dan tindak Lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

b. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Disnakertrans.

c. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 2020 Disnakertrans. d.

Sistimatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja 2020 Disnakertrans, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN LALU**

a. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Disnakertrans.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Disnakertrans Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2018, mengacu kepada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat tahun-tahun sebelumnya. (tabel E.54)

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2017 dan realisasi Renstra Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat. (tabel E.55)

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2018 dan atau realisasi APBD Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Realisasi Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .
- Faktor Penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

b. Analisis Kinerja Pelayanan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

f. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada

Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota.

Deskripsi dalam sub bab ini antara lain :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
- c. Sajikan tabel berikut (usulan program dan kegiatan dari masyarakat)

### **III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.**

#### 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

#### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

#### 3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelesan mengenai ;

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
  - Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
  - Pengentasan tingkat pengangguran dan kemiskinan
  - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  - Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan :
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

#### **IV. PENUTUP.**

Berisikan uraian penutup, berupa ;

- Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.

**BAB. II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI TAHUN LALU****a. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Disnakertrans  
Provinsi Sumatera Barat.**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020, diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan kegiatan dan anggaran dengan baik, dimana bersumber dari anggaran APBN dan APBD sebesar Rp.48.810.001.823,58- dengan rincian sebagai berikut :

- Dana APBD yang dialokasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018 berjumlah Rp.40.391.092.823,58,- dengan realisasi keseluruhan sebagai berikut :
  - Realisasi fisik = 100%
  - Realisasi keuangan = 95.33 % ( Rp.38.505.707.032,- )

Realisasi anggaran Disnakertrans Prov. Sumbar Tahun 2018

**BELANJA TIDAK LANGSUNG**

No	Program / Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi		Fisik %	Sisa Dana (Rp.)
			Keuangan (Rp.)	%		
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>					
1	Gaji dan Tunjangan	14,476,342,317.58	13,976,916,136	96.55	100	499,426,182
2	Tambahan Penghasilan PNS	5,912,949,385	5,794,195,301	97.99	100	118,754,084
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	13,935,000	13,935,000	100	100	0
	Jumlah	<b>20,403,226,702.58</b>	<b>19,785,046,437</b>	<b>96.97</b>	100	<b>618,180,266</b>

**BELANJA LANGSUNG**

No	Program / Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi		Fisik %	Sisa Dana (Rp.)
			Keuangan (Rp.)	%		
<b>I.</b>	<b>POKOK</b>	<b>6,931,734,758</b>	<b>6,347,925,880</b>	<b>91.58</b>	<b>100</b>	<b>583,808,878</b>
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2,967,957,101</b>	<b>2,590,653,590</b>	<b>87.29</b>	<b>100</b>	<b>377,303,511</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	102,499,600	97,459,317	95,08	100	5,040,283
2	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	617,501,876	417,975,237	67.69	100	47.062.392
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor, pengaman dan sopir kantor	1,004,240,000	929,498,940	92.56	100	50.044.343
4	Penyediaan alat tulis kantor	130,500,000	128,564,000	98.52	100	683.200
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	85,000,000	79,744,275	94,09	100	3.955.150
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	44,600,000	41,651,575	99,92	100	19.175
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24,190,000	20,490,000	89,26	100	2.893.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	97,070,000	87,561,500	94,71	100	4.038.250
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	840,355,625	766,508,746	94,84	100	29.047.664
11	Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	18,000,000	17,200,000	92,89	100	800,000
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>2,582,942,374</b>	<b>2,414,763,877</b>	<b>93.49</b>	<b>100</b>	<b>168,178,497</b>
1	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	287,000,000	278,315,500	96.97	100	8,684,500
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200,000,000	187,827,150	93.91	100	12,172,850
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	254,750,000	219,066,501	85.99	100	35,683,499
4	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan / perlengkapan kantor	175,400,000	108,312,352	61.75	100	67,087,648
5	Pemeliharaan rutin/berkala Meubiler	50,000,000	37,819,000	75.64	100	12,181,000
6	Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian asset OPD	145,132,374	117,521,374	80.98	100	27,611,000
7	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1,204,000,000	1,201,311,000	99.78	100	2,689,000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266,660,000	264,591,000	99.22	100	2,069,000
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>191,452,800</b>	<b>183,600,000</b>	<b>95.90</b>	<b>100</b>	<b>7,852,800</b>
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	191,452,800	183,600,000	95.90	100	7,852,800
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
1.	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	15,000,000	15,000,000	100	100	0
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>940,582,483</b>	<b>930,750,813</b>	<b>98.95</b>	<b>100</b>	<b>9,831,670</b>
1.	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	159,528,900	156,605,016	98.17	100	2,923,884
2.	Penatausahaan keuangan SKPD	398,626,583	393,176,690	98.63	100	5,449,893
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	382,427,000	380,969,107	99.62	100	1,457,893

<b>F.</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM</b>	<b>233,800,000</b>	<b>213,157,600</b>	<b>91.17</b>	<b>100</b>	<b>20,642,400</b>
1.	Pemeliharaan Alat Labor	95,850,000	76,174,600	79.47	100	19,675,400
2.	Pengadaan Alat Labor	137,950,000	136,983,000	99.30	100	967,000

No	Program / Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi		Fisik %	Sisa Dana (Rp.)
			Keuangan (Rp.)	%		
<b>II.</b>	<b>URUSAN</b>	<b>13,056,131,363</b>	<b>12,372,734,715</b>	<b>94.77</b>	<b>100</b>	<b>683,396,648</b>
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>7,662,716,745</b>	<b>7,377,701,773</b>	<b>96.28</b>	<b>100</b>	<b>285,014,972</b>
1.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di UPTD BLK Padang Panjang	2,855,895,870	2,760,051,899	96.64	100	95,843,971
2.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di UPTD BLK Payakumbuh	2,915,458,125	2,821,528,991	96.78	100	93,929,134
3.	Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM)	284,833,200	284,207,863	99.78	100	625,337
4.	Pelatihan Pra Seleksi Calon Peserta Magang ke Jepang	193,911,000	191,252,100	98.63	100	2,658,900
5.	Sosialisasi dan Seleksi Daerah Calon Peserta Magang ke Jepang	100,465,100	92,412,100	91.98	100	8,053,000
6.	Seleksi Pusat Calon Peserta Magang ke Jepang	329,315,100	283,611,698	86.12	100	45,703,402
7.	Workshop Program Pemagangan	158,275,700	156,906,124	99.13	100	1,369,576
8.	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri	135,185,000	133,247,200	98.57	100	1,937,800
9.	Pelatihan peningkatan produktivitas	232,863,150	231,957,150	99.61	100	906,000
10..	Monitoring program pelatihan ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kab/Kota	100,193,500	91,741,250	91.56	100	8,452,250
11.	Pelatihan Motivasi Berprestasi bagi usaha Produktif	204,222,000	203,722,000	99.76	100	500,000
12.	Akreditasi Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	152,099,000	127,063,398	83.54	100	25,035,602
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN DISVERSIFIKASI USAHA</b>	<b>47,755,100</b>	<b>1,982,470,033</b>	<b>93.90</b>	<b>100</b>	<b>128,870,767</b>
1.	Pengumpulan dan Pengelolaan Data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	107,103,400	40,203,200	84.19	100	7,551,900
2.	Sosialisasi Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam negeri / Luar Negeri	66,970,000	101,193,800	94.48	100	5,909,600
3.	Monitoring dan Orientasi Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	95,445,000	60,451,125	90.27	100	6,518,875
4.	Pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pra- Pemberangkatan	93,489,600	95,396,150	99.95	100	48,850
5.	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS)	69,108,000	89,066,900	95.27	100	4,422,700
6.	Identifikasi lokasi wilayah padat karya	200,268,000	60,624,043	87.72	100	8,483,957
7.	Bintek perantara kerja	124,107,000	197,625,100	98.68	100	2,642,900
8.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan kepada Calon Pencari Kerja	46,748,000	120,656,260	97.22	100	3,450,740
9.	Bimbingan Teknis Petugas Pengumpul dan Pengolah Informasi Pasar Kerja (IPK)	43,739,700	46,216,100	98.86	100	531,900
10.	Pengumpulan dan pengolahan data Informasi Pasar Kerja (IPK)	82,395,000	33,377,900	76.31	100	10,361,800

11.	Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK)	316,617,000	63,758,000	77.38	100	18,637,000
12.	Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)	280,241,000	306,798,200	96.90	100	9,818,800
13.	Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	334,422,000	258,581,705	92.27	100	21,659,295
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Dana (Rp.)</b>	<b>Realisasi Keuangan (Rp.)</b>	<b>%</b>	<b>Fisik %</b>	<b>No</b>
14.	Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	202,932,000	330,800,400	98.92	100	3,621,600
15.	Pembinaan Bursa Kerja Online	47,755,100	177,721,150	87.58	100	25,210,850
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>	<b>772,966,000</b>	<b>659,754,400</b>	<b>85.35</b>	<b>100</b>	<b>113,211,600</b>
1.	Pembinaan Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten/Kota	89,500,000	87,597,400	97.87	100	1,902,600
2.	Pembinaan Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/kota dan penetapan UMP	177,954,000	164,738,800	92.57	100	13,215,200
3.	Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Kesehatan di Kab/Kota	91,891,000	91,095,200	99.13	100	795,800
4.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di tingkat perusahaan	73,255,000	64,308,000	87.79	100	8,947,000
5.	Pembinaan, pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Bipartit di Perusahaan	72,716,000	68,802,800	94.62	100	3,913,200
	Pembinaan, pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Tripartit di Kab/Kota dan Provinsi	77,961,000	50,043,700	64.19	100	27,917,300
	Pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan	108,858,000	97,836,500	89.88	100	11,021,500
	Pemetaan Perusahaan Melalui Deteksi Dini di Perusahaan	80,831,000	35,332,000	43.71	100	45,499,000
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN SISTEM PENGAWASAN TENAGA KERJA</b>	<b>1,377,395,418</b>	<b>1,269,350,607</b>	<b>92.16</b>	<b>100</b>	<b>108,044,811</b>
1.	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	206,845,218	177,267,526	85.70	100	29,577,692
2.	Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan	115,510,000	105,343,300	91.20	100	10,166,700
3.	Penanganan kasus ketenagakerjaan dan permasalahan ketenagakerjaan	161,527,800	144,763,592	89.62	100	16,764,208
4.	Pembinaan dan penilaian ke perusahaan dalam rangka pencapaian zero accident	139,265,500	124,253,526	89.22	100	15,011,974
5.	Pemeriksaan kesehatan kerja	105,907,500	105,434,752	99.55	100	472,748
6.	Pengujian lingkungan kerja	109,340,700	108,862,900	99.56	100	477,800
7.	Akreditasi laboratorium	118,680,000	109,602,908	92.35	100	9,077,092
	Peringatan bulan K3	184,280,000	174,663,300	94.78	100	9,616,700
	Pemeriksaan norma kerja dan norma Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan Kab/Kota	236,038,700	219,158,803	92.85	100	16,879,897
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN</b>	<b>604.302.200</b>	<b>910,292,362</b>	<b>98.82</b>	<b>100</b>	<b>10,834,038</b>

<b>DAERAH TERTINGGAL</b>						
1.	Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi	<b>921,126,400</b>	264,118,108	97.65	100	6,345,592
2.	Pengelolaan pengembangan usaha di kawasan transmigrasi	270,463,700	106,526,965	99.61	100	412,785
3.	Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi	106,939,750	434,500,921	99.54	100	1,999,079
4.	Pembinaan potensi kawasan transmigrasi	436,500,000	40,950,200	97.50	100	1,049,800
5.	Penataan persebaran penduduk warga transmigrasi	42,000,000	64,196,168	98.43	<b>100</b>	1,026,782
<b>F. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>						
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi	210,586,000	173,165,540	82.23	100	37,420,460
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>		<b>40,391,092,823.58</b>	<b>38,505,707,032</b>	<b>95.33</b>	<b>100</b>	<b>1,885,385,792</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja tidak ada, karena telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, yang realisasi keuangan dibawah 90% antara lain :
  - a. Program pelayanan administrasi perkantoran
    - Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik karena adanya keterlambatan dalam pemasangan jaringan Internet dengan telkomsel di karenakan keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan
    - Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan karena menyesuaikan dengan kebutuhan kantor.
  - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional karena belum tuntasnya proses hibah kendaraan dinas yang sumber dari pusat sehingga biaya pemeliharaan kendaraan dinas tidak terealisasi.
    - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor karena penyesuaian dengan kondisi peralatan/perlengkapan kantor
    - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur karena penyesuaian dengan kondisi meubiler.

- Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD karena adanya honorarium pengelola asset daerah tidak di akomodir pada pergub standar biaya
- c. Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium
  - Kegiatan Pemeliharaan Alat Labor karena turunnya biaya kalibrasi alat labor yang dilaksanakan di Padang, mengakibatkan efisiensi anggaran biaya pemeliharaan alat labor.
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - Kegiatan Seleksi Pusat Calon Peserta Magang ke Jepang karena keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
  - Kegiatan Akreditasi Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) karena keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
- e. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Disversikasi Usaha
  - Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data ketenagakerjaan dan Ketranmigrasian karena keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
  - Kegiatan Identifikasi Lokasi Wilayah Padat Karya karena keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
  - Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) karena keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
  - Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) karena keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
  - Kegiatan Pembinaan Bursa Kerja Online karenakan keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.

- e. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Perusahaan karena keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
  - Pembinaan, Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Tripartit di Kab/Kota dan Provinsi karena keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
  - Pembinaan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan karena keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
  - Pemetaan Perusahaan Melalui Deteksi Dini di Perusahaan karena keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
- f. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja
- Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan karenakan keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
  - Penanganan Kasus Ketenagakerjaan dan Permasalahan Ketenagakerjaan karenakan keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
  - Pembinaan dan Penilaian ke Perusahaan Dalam Rangka Pencapaian Zero Accident karena keterlambatan turunnya anggaran perubahan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
- g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi karena :
    - Adanya peralihan biaya tarif perjalanan dinas dari Perda No.1/2016 disesuaikan dengan Pergub No.74/2016.
    - Permintaan perusahaan ada, namun tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya tenaga yang terakreditasi dan belum semua tenaga teknis memiliki sertifikat sesuai keahlian.

Dana APBN yang dialokasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018 berjumlah Rp. 8.418.909.000,- dengan realisasi keseluruhan sebagai berikut :

- Realisasi Fisik = 97,92 %
- Realisasi Keuangan = 93,00 % (Rp.7.829.465.454,-)

Tabel 2.2

## ➤ Realisasi anggaran Disnakertrans Prov. Sumbar Tahun 2018

NO. KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Fisik (%)	DANA (Rp)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>SATUAN KERJA (026.05.089022) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT (05)</b>			
<b>026.05.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA</b>	<b>100.00</b>	<b>518,598,000</b>	<b>454,136,975</b>
<b>2180</b>	<b>Peningkatan Penerapan Pengupahan</b>	<b>100.00</b>	<b>30,500,000</b>	<b>18,089,000</b>
<b>2180.004</b>	<b>Anggota dewan pengupahan yang diberdayakan</b>	<b>100.00</b>	<b>30,500,000</b>	<b>18,089,000</b>
052	Konsolidasi Dewan Pengupahan Se-Indonesia	100.00	30,500,000	18,089,000
<b>2183</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>	100.00	<b>182,463,000</b>	<b>154,400,975</b>
<b>2183.001</b>	<b>Pelayanan dalam rangka peningkatan kepuasan pegawai atas pelayanan internal Ditjen PHI dan Jamsos</b>	100.00	<b>182,463,000</b>	<b>154,400,975</b>
090	Administrasi kegiatan untuk Provinsi	100.00	182,463,000	154,400,975
<b>5586</b>	<b>Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>	100,00	35.000.000	28.373.000
<b>5586.001</b>	<b>Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial</b>	100,00	183.476.000	182.408.700
051	Diseminasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi sektor informal	100,00	170.024.000	166.237.000
<b>II</b>	<b>SATUAN KERJA (026.08.089025) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT (08)</b>			
<b>026.08.09</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>100,00</b>	<b>776.751.000</b>	<b>730.102.048</b>
<b>2197</b>	<b>Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan</b>	100,00	123.965.000	122.478.500
<b>2197.004</b>	<b>Pembinaan Fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	100,00	123.965.000	122.478.500
140	Rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi	100,00	123.965.000	122.478.500
<b>2198</b>	<b>Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak</b>	100,00	29.448.000	29.371.500
<b>2198.003</b>	<b>PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DI BIDANG NORMA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN</b>			
107	Pemeriksaan / pengujian norma ketenagakerjaan			
<b>2199</b>	<b>Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>	100,00	<b>200.624.000</b>	<b>192.785.000</b>
<b>2199.001</b>	<b>PEMBINAAN NORMA KETENAGAKERJAAN BIDANG KELEMBAGAAN, KEAHLIAN DAN SISTEM MANAJEMEN K3</b>	100,00	88.244.000	82.336.000
120	Sosialisasi kampanye penyuluhan dan penyebaran informasi	100	88.244.000	82.336.000

	norma ketenagakerjaan			
<b>2199.003</b>	<b>PEMBINAAN NORMA KETENAGAKERJAAN BIDANG KONSTRUKSI BANGUNAN, LISTRIK DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>	100	178.950.000	178.522.000
107	Pemeriksaan / pengujian norma ketenagakerjaan	100	178.950.000	178.522.000
<b>2200</b>	<b>Peningkatan penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>			
<b>2200.001</b>	<b>Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Bidang Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pengupahan</b>			
107	Pemeriksaan / pengujian norma ketenagakerjaan	100	<b>178.950.000</b>	<b>176.522.863</b>
<b>2200.002</b>	<b>Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja</b>	100,00	49.900.000	48.985.000
107	Pemeriksaan / pengujian norma ketenagakerjaan	100,00	49.900.000	48.985.000
<b>2200.004</b>	<b>Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>	100,00	71,650,000	71,608,863
107	Pemeriksaan / pengujian norma ketenagakerjaan	100,00	71,650,000	71,608,863
<b>2201</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja</b>	<b>100</b>	<b>230.112.000</b>	<b>195,218,800</b>
<b>2201.003</b>	<b>Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Ditjen Binwasnaker dan K3</b>		<b>24,552,000</b>	<b>19,823,400</b>
130	Penyusunan / Perencanaan Kerja / Kegiatan / Anggaran	98.70	24,552,000	19,823,400
<b>2201.004</b>	<b>Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal</b>	<b>75.00</b>	<b>31,380,000</b>	<b>22,215,400</b>
115	Pelaksanaan Pengelolaan keuangan	75.00	31,380,000	22,215,400
<b>2201.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>		<b>174,180,000</b>	<b>153,180,000</b>
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100.00	174,180,000	153,180,000
<b>III</b>	<b>SATUAN KERJA (026.13.089026) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT (13)</b>			
<b>026.13.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS</b>	<b>99.53</b>	<b>2,735,988,000</b>	<b>2,690,470,306</b>
<b>2217</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas</b>	<b>96.40</b>	<b>355,680,000</b>	<b>339,004,000</b>
<b>2217.056</b>	<b>Bertambahnya Jejaring Pemagangan</b>	<b>96.40</b>	<b>355,680,000</b>	<b>339,004,000</b>
054	Operasional Ka-LPK	100.00	43,100,000	43,100,000
055	Administrasi Kegiatan di Dinas Provinsi	100.00	184,490,000	182,494,000
056	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	90.00	128,090,000	113,410,000
<b>2218</b>	<b>Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri</b>	<b>100.00</b>	<b>56,900,000</b>	<b>56,900,000</b>
<b>2218.055</b>	<b>Bertambahnya Jejaring Pemagangan</b>	<b>100.00</b>	<b>56,900,000</b>	<b>56,900,000</b>
051	Pengelolaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan	100.00	56,900,000	56,900,000
<b>2220</b>	<b>Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas</b>	<b>100.00</b>	<b>188,408,000</b>	<b>182,809,951</b>
<b>2220.053</b>	<b>Perusahaan yang dinilai tingkat kinerjanya</b>			
<b>2220.053.002</b>	<b>Penilaian Kinerja Perusahaan (Siddhakarya)</b>	<b>100.00</b>	<b>188,408,000</b>	<b>182,809,951</b>

053	Penilaian Kinerja Perusahaan (Siddhakarya) di Provinsi Sumatera Barat	100.00	188,408,000	182,809,951
<b>4057</b>	<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas</b>	<b>100.00</b>	<b>2,135,000,000</b>	<b>2,111,756,355</b>
<b>4057.009</b>	<b>Peserta Pemagangan Yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi</b>	<b>100.00</b>	<b>2,135,000,000</b>	<b>2,111,756,355</b>
051	Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri	100.00	2,135,000,000	2,111,756,355
<b>IV</b>	<b>SATUAN KERJA (067.07.418247) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV.SUMBAR (07)</b>			
<b>067.07.10</b>	<b>PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI</b>	<b>98.64</b>	<b>1,911,961,000</b>	<b>1,840,706,300</b>
<b>5505</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi</b>	<b>100.00</b>	<b>295,346,000</b>	<b>283,598,200</b>
<b>5505.950</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</b>	<b>100.00</b>	<b>135,498,000</b>	<b>126,757,400</b>
053	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	100.00	48,404,000	46,159,000
054	Perlaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	100.00	22,032,000	21,676,000
055	Pengelolaan Data dan Informasi	100.00	20,474,000	18,137,500
056	Pengelolaan Keuangan	100.00	44,588,000	40,784,900
<b>5505.994</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</b>	<b>100.00</b>	<b>159,848,000</b>	<b>156,840,800</b>
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100.00	159,848,000	156,840,800
<b>5506</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk</b>	<b>98.40</b>	<b>1,459,985,000</b>	<b>1,408,995,650</b>
<b>5506.001</b>	<b>Persebaran Penduduk yang Tertata Dipermukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi</b>	<b>98.40</b>	<b>1,459,985,000</b>	<b>1,408,995,650</b>
054	Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	98.40	1,459,985,000	1,408,995,650
<b>5507</b>	<b>Pembangunan Permukiman Transmigrasi</b>	<b>98.00</b>	<b>135,196,000</b>	<b>127,606,950</b>
<b>5507.001</b>	<b>Pemukiman Transmigrasi yang dibangun</b>	<b>98.00</b>	<b>135,196,000</b>	<b>127,606,950</b>
060	Laporan Kegiatan dan Pembinaan	98.00	135,196,000	127,606,950
<b>5508</b>	<b>Penyediaan Tanah Transmigrasi</b>	<b>100.00</b>	<b>21,434,000</b>	<b>20,505,500</b>
<b>5508.001</b>	<b>Luasan Tanah Satuan Permukiman (Ha) Yang Difasilitasi Pengurusan Penerbitan SKHPL</b>	<b>100.00</b>	<b>21,434,000</b>	<b>20,505,500</b>
052	Pemeliharaan Tanah HPL	100.00	21,434,000	20,505,500
<b>V</b>	<b>SATUAN KERJA (067.08.350145) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT (08)</b>			
<b>067.08.11</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>94.82</b>	<b>2,475,611,000</b>	<b>2,475,611,000</b>
<b>5511</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>97.49</b>	<b>218,330,000</b>	<b>218,330,000</b>
<b>5511.001</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>97.49</b>	<b>218,330,000</b>	<b>218,330,000</b>
051	Penyusunan program dan anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja	98.00	143,378,000	143,378,000
052	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan BMN	96.50	74,952,000	74,952,000
<b>5512</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi</b>	<b>100.00</b>	<b>235,735,000</b>	<b>235,735,000</b>

<b>5512.001</b>	<b>Laporan /Kesepakatan Koordinasi dengan KL dan Pemda dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi</b>	<b>100.00</b>	<b>213,195,000</b>	<b>213,195,000</b>
058	Mitigasi Lingkungan di Kawasan Transmigrasi	100.00	213,195,000	213,195,000
<b>5512.003</b>	<b>Laporan /Kesepakatan Koordinasi dengan KL dan Pemda dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi</b>	<b>100.00</b>	<b>22,540,000</b>	<b>22,540,000</b>
051	Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi	100.00	22,540,000	22,540,000
<b>5513</b>	<b>Pengembangan Usaha Transmigrasi</b>	<b>98.00</b>	<b>373,705,000</b>	<b>373,705,000</b>
<b>5513.001</b>	<b>Kawasan Transmigrasi yang ditingkatkan produktivitas lahannya dan dikembangkan agrobisnis dan agroindustri</b>	<b>98.00</b>	<b>373,705,000</b>	<b>373,705,000</b>
051	Pengadaan sarana produksi pertanian	98.00	373,705,000	373,705,000
<b>5514</b>	<b>Pengembnagn Sosial Budaya Transmigrasi</b>	<b>91.84</b>	<b>1,413,601,000</b>	<b>1,413,601,000</b>
<b>5514.001</b>	<b>Kawasan Transmiugrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya</b>	<b>91.84</b>	<b>1,413,601,000</b>	<b>1,413,601,000</b>
051	Pengadaan Catu Pangan	96.00	771,286,000	771,286,000
052	Fasilitasi Layanan Sosial di SP dan Kawasan Transmigrasi	85.12	567,525,000	567,525,000
054	Kelembagaan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang berfungsi	100.00	74,790,000	74,790,000
<b>5515</b>	<b>Pelayanan Pertanahan Transmigrasi</b>			
<b>5515.001</b>	<b>Bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat hak milik atas tanah transmigran</b>	<b>100.00</b>	<b>234,240,000</b>	<b>234,240,000</b>
051	Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi	<b>100.00</b>	<b>234,240,000</b>	<b>234,240,000</b>

## Capaian kinerja tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		Sat	Target ( % )	Realisasi (%)	%
1 Meningkatkan tata kelola organisasi	- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	%	B	B	
	- Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	%	95,00	95,33	100,35
2 Meningkatkan kesempatan kerja	- Persentase peningkatan serapan tenaga kerja	%	23,66	27,87	117,79
3 Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis,dinamis dan berkeadilan	- Persentase perusahaan yang taat peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	%	6,20	9,34	150,64
4 Meningkatnya pendapatan masyarakat di kawasan Transmigrasi	- Persentase peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan transmigrasi	%	40,00	40,00	100

Pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

Target, Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	2017		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian kinerja %
Persentase tenaga kerja yang berkompeten	44,31	48,05	108,44
Persentase lembaga pelatihan kerja terakreditasi	-	-	-
Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi	49,37	49,37	100
Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	21,46	28,45	132,57
Persentase serapan tenaga kerja sektor in formal	3,54	6,19	174,85
Persentase jumlah perselisihan hubungan industrial	-	-	-
Persentase penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial	4,73	6,11	129,17
Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	-	-	-
Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	7,07	7,50	106,08
Persentase kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	-	-	-
Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan	48,82	48,57	99,28
Persentase perusahaan melakukan SMK3	10,64	10,65	100,09
Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi	-	-	-
Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan sosial budaya	-	-	-
Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya	40,00	40,00	100

## **b. Analisis Kinerja Pelayanan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat**

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah.

Indikator yang dikaji adalah terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut :

### ➤ Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2018

Hasil pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

- Hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran 1 (pertama) Meningkatnya tata kelola organisasi
  - terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu
  - Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target kinerja B realisasi B dengan capaian indikator kategori "baik".
  - Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan dengan target kinerja 95,00%, realisasi 95,33% dengan capaian kinerja menjadi 100,35%. capaian indikator kategori "sangat baik".
- Hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran 2 (dua) Meningkatkan kesempatan kerja dimana indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan serapan tenaga kerja dengan target kinerja 23,66 % realisasi 27,87% dan capaian kinerja 117,79%. capaian indikator kategori "sangat baik"
- Hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dimana indikator kinerjanya adalah persentase perusahaan yang taat peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan target kinerja 6,20% realisasi 9,34% dan capaian kinerja 150,64%. capaian indikator kategori "sangat baik"

- Hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja sasaran 4 (empat) meningkatnya pendapatan masyarakat di kawasan Transmigrasi dimana indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan transmigrasi dengan target kinerja 40,00% realisasi 40,00% dan capaian kinerja 100%. capaian indikator kategori "baik".

**c. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat**

- a) Jalannya roda pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Situasi perekonomian mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Terhadap bidang ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, sedangkan terhadap bidang ketransmigrasian melalui pencadangan tanah, pembangunan permukiman transmigrasi dan pengembangan serta pelatihan transmigran dan masyarakat di kawasan transmigrasi. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan serta penambahan penduduk.

Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi yang pada tahun 2018 jumlah angkatan kerjanya sebesar 2.552.130 orang, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak- anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberi peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja. Bonus demografi akan menjadi *windows of opportunity* bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di masa depan. Namun bonus demografi menjadi *windows of disaster* jika sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan SMP atau SMA,

lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 2.552.130 orang, bertambah 68.455 orang dibanding Agustus 2017. Kondisi ini mengalami fluktuasi yang sama dengan Nasional yakni angkatan kerja Indonesia pada

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat pada Agustus 2018 mencapai 5,55 persen mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dibanding TPT Agustus 2017.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan ketrasmigrasian, baik dari segi daya tampung maupun dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

Sumatera Barat memiliki 6 (enam) lokasi penyelenggaraan transmigrasi tetapi baru di 1(satu) SP lokasi Kabupaten yang dilaksanakan penempatan transmigrasi yaitu lokasi Padang tarok Kab. Sijunjung sebanyak 210 KK, hal ini merupakan tugas bersama sektor-sektor terkait untuk mewujudkannya.

- b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

No.	Kegiatan	Permasalahan	Solusi
1.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan di UPTD BLK Padang Panjang	- Kekurangan tenaga instruktur	- Melibatkan instruktur dan Lembaga Pelatihan Swasta yang ada di Kab/Kota tempat pelatihan dilaksanakan.
		- Pelaksanaan Uji Kompetensi yang direncanakan terhadap 10 paket pelatihan hanya 1 (satu) paket yang terealisasi yaitu jurusan Sepeda Motor dilakukan oleh LSP LLAJR.	- Pada tahun 2018 akan disegerakan dibentuk LSP Penguji di Provinsi Sumatera Barat.
2.	Pelatihan kewirausahaan mandiri dan pelatihan motivasi berprestasi bagi usaha produktif	- Terbatasnya anggaran kegiatan pelatihan yang didanai melalui APBD, sehingga target pelatihan belum dapat tercapai, padahal animo masyarakat, UMKM untuk ikut dalam pelatihan yang berada di Kab/Kota sangat tinggi.	- Sesuai Tusi UPTD BPPD dalam pelaksanaan pelatihan harus didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra tercapai.
3.	Pembinaan dan monitoring perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.	- Perusahaan-perusahaan pada sektor usaha Mikro Kecil/ Menengah masih banyak yang belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya karena belum memahami ketentuan yang mengatur tentang jaminan sosial.	- Perlu dilakukan pembinaan dan monitoring secara kontinu ke perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

4.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan perusahaan tidak memahami hubungan industrial.</li> <li>- Sering ditemui perusahaan belum mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerja sehingga tenaga kerjanya kurang dari 10 orang, hal ini kurang menyebabkan kurang tepat sasaran pembinaan mengenai khususnya hubungan industrial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiranya kegiatan tetap dipertahankan.</li> </ul>
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ada pimpinan/pengurus perusahaan yang belum melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap objek pengawasan atau peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dioperasikan di perusahaan sehingga dapat berdampak kepada terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta kerugian pada semua pihak.</li> <li>- Masih rendahnya pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dari sebagian pengawas ketenagakerjaan, sehingga pembinaan dan pengawasan serta pemeriksanaan yang dilakukan tidak/belum menyentuh substansi/pokok permasalahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pimpinan/pengurus perusahaan, sehingga perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan sebagai objek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dimiliki dan dioperasikan di perusahaan, guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan kerugian pada semua pihak.</li> </ul>
6.	Pemeriksaan kesehatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan kerja seperti Reaction timer, Spirometer, Kit cholinestrase, timbang badan dan meteran badan, tensimeter, stop wath, metronom.</li> <li>- Perlu diadakan pelatihan para medis dan pelatihan hiperkes bagi Dokter Perusahaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya penambahan jumlah peralatan untuk pemeriksaan kesehatan kerja sehingga dapat dilakukan pemeriksaan secara maksimal.</li> <li>- Penambahan anggaran untuk pengujian/ pemeriksaan secara maksimal dan pelatihan paramedis.</li> </ul>

Permasalahan dan solusi Bidang Transmigrasi

Kegiatan	Permasalahan	Solusi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengusulan dan pengurusan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) lokasi Padang Hilalang SP.2 belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat pusat karena diindikasikan areal berada diluar RTRW Kabupaten Dharmasraya.</li> <li>- Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru sebanyak 25 KK yang dananya telah dialokasikan ke Dinas Transmigrasi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan rapat bersama instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten tentang kepastian calon areal pembangunan permukiman transmigrasi Padang Hilalang SP.2 Kab. Dharmasraya berada diluar RTRW Kabupaten Dharmasraya, sekaligus melaksanakan revisi RTRW oleh pihak Kabupaten Dharmasraya.</li> <li>- Terkait administrasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang belum klir antara Menteri desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan calon perusahaan IPK, telah dibuatkan surat Gubernur</li> </ul>

	<p>Tenaga Kerja oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tidak dapat direalisasikan karena belum kirnya permasalahan administrasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) antara Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan perusahaan calon IPK.</p> <p>- Terkait usulan penetapan Kawasan Transmigrasi dari Bupati Dharmasraya melalui Gubernur Sumatera Barat kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak dapat ditindaklanjuti, karena belum adanya rekomendasi dari Bappeda Kabupaten Dharmasraya bahwa calon lokasi transmigrasi Padang Hilalang SP.2 berada pada RTRW Kabupaten Dharmasraya.</p>	<p>Sumatera Barat ke Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kiranya agar merealisasikan Perjanjian Kerjasama dimaksud.</p>
	<p>- Tidak tersedianya alokasi untuk pendampingan petugas ke Kabupaten dan lokasi atas kunjungan pejabat/petugas dari Kabupaten daerah asal untuk melakukan peninjauan dalam rangka kerjasama pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>- Bangunan Transito tidak layak fungsi, akan kesulitan dalam proses penempatan Tahun Anggaran 2018, dimana Transmigran dari Daerah Asal akan diangkut dengan pesawat udara yang memerlukan fasilitas transito sebagai tempat peristirahatan</p>	<p>- Mengusulkan ke pusat/ mengalokasikan dana pendampingan peninjauan ke kabupaten/lokasi oleh daerah asal melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat.</p>

---

---

	sebelum	menuju	lokasi	
	Padang Tarok SP.1 K			



	<p>- Belum ada bangunan gedung SD dan Guru yang menetap di lokasi transmigrasi Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung, sedangkan SD terdekat dari lokasi jaraknya ± 11 KM yaitu SD Negeri 21 di Jorong Pintu Batu dan SD Negeri 06 di Jorong Muaro Buan.</p> <p>- Bidang Mental Spritual : Belum ada Masjid di lokasi Transmigrasi, Masjid terdekat di Jorong Muaro Buan, kegiatan ibadah dilaksanakan di Balai Desa.</p> <p>- Bidang Kesehatan : Belum ada Pustu (Puskesmas Pembantu) dilokasi Padang tarok SP.1, yang terdekat dengan lokasi adalah Poskesri Binuang Aie Putih dan Nagari Padang tarok yang jaraknya ± 11 km.</p> <p>- Bidang Optimalisasi lahan. Warga Transmigran Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung mendapatkan Lahan Pekarangan 0,2 Ha dan lahan Usaha I 0,8 Ha, yang ditanami berbagai macam tanaman pangan (padi, jagung, singkong) dan tanaman sayuran serta tanaman perkebunan yaitu kelapa dalam yang bersumber dari dana APBN bantuan Paket A dan paket B, serta bantuan jagung dan kakao dari Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung. Tanaman warga tersebut diserang hama babi, kera dan tikus, sehingga hasil panen warga tidak maksimal,</p>	<p>- Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, perlu dibangun gedung SD di lokasi Padang Tarok SP.2 Kabupaten Sijunjung dan memfasilitasi guru, minimal memanfaatkan Balai Desa untuk sementara mengingat jika bergabung dengan SD terdekat jarak tempuhnya ± 11 KM.</p> <p>- Perlu dibangun gedung TK/PAUD dan memfasilitasi guru TK/PAUD di lokasi transmigrasi, karena pendidikan anak usia dini sangat diperlukan, pembentukan ahlak dan mental anak.</p> <p>- Mengingat belum adanya bangunan Masjid/ Musholla di lokasi Transmigrasi, diharapkan adanya bangunan sehingga warga transmigrasi dapat beribadah, kerukunan antar umat beragama dapat terjamin.</p> <p>- Perlu dibangun Pustu dan memfasilitasi petugas medis di lokasi transmigrasi, mengingat Poskesri dan Pustu terdekat dari lokasi jaraknya ± 11 km.</p> <p>- Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha I warga transmigrasi Padang Tarok SP.1 mohon dipagar untuk mencegah tanaman warga dirusak oleh babi, agar dimasukkan di anggaran APBN/APBD.</p> <p>- Transmigran Padang Tarok SP.1 mohon tambahan jadup, agar Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mengalokasikan.</p> <p>- Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, perlu dibangun gedung SD di lokasi Padang Tarok SP.2 Kabupaten Sijunjung dan memfasilitasi guru, minimal memanfaatkan Balai Desa untuk sementara mengingat jika bergabung dengan SD terdekat jarak tempuhnya ± 11 KM.</p> <p>- Perlu dibangun gedung TK/PAUD dan memfasilitasi guru TK/PAUD di lokasi transmigrasi, karena pendidikan anak usia dini sangat diperlukan, pembentukan ahlak dan mental anak.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>ada yang gagal panen. Sementara bantuan jadup sudah habis.Warga minta lahan pekarangan dan lahan usaha I nya di</p>	<p>- Mengingat belum adanya bangunan Masjid/ Musholla di lokasi Transmigrasi, diharapkan adanya bangunan sehingga warga trans migrasi dapat beribadah, kerukunan antar umat beragama dapat terjamin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dibangun Pustu dan memfasilitasi petugas medis di lokasi transmigrasi, mengingat Poskesri dan Pustu terdekat dari lokasi jaraknya ± 11 km.</li> <li>- Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha I warga transmigrasi Padang Tarok SP.1 mohon dipagar untuk mencegah tanaman warga dirusak oleh babi, agar dimasukkan di anggaran APBN atau APBD.</li> <li>- Transmigran Padang Tarok SP.1 mohon tambahan jadup, agar Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mengalokasikannya.</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- c) Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang adil, sejahtera dan bermatabat”.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan oleh masyarakat untuk dapat mewujudkan Visi pembangunan.

Misi pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

- d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat

- Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

- Tersusunya dokumen perencanaan yang sinkron dan runut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan
- Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi.
- Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang cakap di bidang perencanaan pembangunan daerah

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan OPD lain di Tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan ke depan.

Penjelasan Isu – Isu Penting yang dikaitkan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dari hasil evaluasi capaian kinerja bahwa target tingkat pengangguran pada tahun 2018 sebesar 5,55 %, sejalan dengan hasil BPS disampaikan bahwa realisasi tingkat pengangguran di Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebesar 5,58 %, Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2018 sebanyak 2.410.450 orang, naik sebanyak 65.478 orang dari Agustus 2017. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada sektor perdagangan (2,39 point), sektor konstruksi (0,96 point) dan sektor jasa kemasyarakatan (0,29 point). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah sektor pertanian (1,28 point), sektor pertambangan (1,11 point), sektor industri (0,25 point) dan sektor listrik gas dan air (0,1 point).

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN 2020**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana ditegaskan pemerintah dalam RKPD tahun 2020, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan sektor ekonomi yang kuat yang berbasis kepada sumberdaya daerah, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif yang mendukung kegiatan pariwisata dan menciptakan (PMDN) dan swasta asing (PMA) serta investasi pemerintah serta BUMD melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung kepada kegiatan ekspor komoditi utama, serta mengurangi jumlah pengangguran dengan mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong semakin berkembangnya investasi swasta, perluasan ekspor melalui pembentukan zona prosesing ekspor pada wilayah koridor ekonomi yang ada, pemberdayaan usaha mikro menengah, peningkatan kualitas teknis pengelola agribisnis dengan pengembangan diperkirakan sebesar 5,3% - 5,8%. Menghadapi tahun anggaran

2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, arah dan kebijakan antara lain mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian, peningkatan produktivitas, peningkatan upah, penjaminan kesejahteraan, perlindungan pekerja dan kebebasan berserikat.

### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat**

Tujuan :

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
- b. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- c. Meningkatnya kesejahteraan transmigran

Sasaran :

- a. Meningkatkan tata kelola organisasi
- b. Meningkatnya kesempatan kerja

- c. Meningkatnya kondisi hubungan kerja yang harmonis d.
- Meningkatkan pembangunan kawasan transmigrasi
- e. Meningkatnya kemandirian transmigrasi.

### **3.3. Program dan Kegiatan APBD 2020**

- a. Faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
  - Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merupakan pencapaian OPD dalam pencapaian Visi Gubernur Sumatera Barat sejahtera dan Misi 4 “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah”
  - RPJMD 2016- 2021  
Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021  
Tujuan  
Menurunkan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal  
Sasaran  
Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan menuntaskan penanganan daerah tertinggal,”
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
  - Jumlah Program dan kegiatan sebanyak 12 program dan 79 kegiatan
  - Dasar penyusunan program dan kegiatan menindalanjuti hasil dari verifikasi Tim TAPD, hasil Rakor Gubernur dengan Bupati dan Walikota se Sumatera barat dan hasil Pra Musrebang.
  - total kebutuhan dana pagu indikatif APBD tahun 2020 sebesar Rp.21.305.999.999,- Dua puluh satu milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

**Tabel 3.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5		6
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.411.524.893</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	Padang Padang Panjang Payakumbuh Sijunjung	2.200	surat	123.000.000
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik 1 tahun	Padang Padang Panjang Payakumbuh Sijunjung	12	bulan	404.245.000
3.	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Jasa kebersihan , pengaman dan sopir kantor Serta UPTD	Padang Padang Panjang Payakumbuh	12	bulan	1,865,600,000
4.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis Kantor yang dibutuhkan	Padang Padang Panjang Payakumbuh Sijunjung	12	bulan	171.000.000
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Padang Padang Panjang Payakumbuh Sijunjung	12	bulan	120.000.000
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan	Padang Padang Panjang Payakumbuh Sijunjung	12	bulan	61.000.000
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Padang Padang Panjang Payakumbuh Sijunjung	3	jenis	34.000.000
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan Makan Dan Minum	Padang Padang Panjang Payakumbuh Sijunjung	12	bulan	115,981,000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>6</b>
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kebutuhan Rapat Koordinasi , Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Padang	12	bulan	484,098,893
10.	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Kebutuhan Jasa Informasi ,Dokumentasi, Dan Publikasi	Padang	12	bulan	14,600.000
11.	Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur	Jumlah ceramah agama dan senam pagi	Padang	12	bulan	18.000.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.435.561.416</b>

1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat 2 Unit	Padang,	2	unit	460.000.000
2.	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Jumlah komputer dan perlengkapan yang di adakan	Padang	2 5 5 4	Unit Pc Laptop UPS Printer	194,970,310
3.	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	Padang Padang Panjang Payakumbuh	16 4 2 12 1	Unit AC Wireles Soundsisti Exhaust fan Layar info	324.436.690
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Padang Padang Panjang Payakumbuh Sijunjung	1   3	Unit gedung dinas UPTD	197,720,000
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Padang Padang Panjang Payakumbuh	19  1	Unit roda 4 Unit roda 2	250,650,416
6.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	Padang		Mesin tik Ac Genset TOA Wireles Proyektor Pompa Air Mesin finger Telp & fax Komp & jaringan Alat studio	185,184,000
7.	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Dipelihara	Padang	87 46 10	Unit meja Kursi lemari	57,600.000
8.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung Kantor yang direhab	Padang, Padang Panjang dan Payakumbuh	1	Unit gedung workshop BLK Pyk	765.000.000

1	2	3	4	5		6
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>217.363.803</b>
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Padang	245	Stel	217,363,803
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat</b>		<b>20</b>	<b>Jpl/or/th</b>	<b>27.170.475</b>
1.	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	Padang	6	orang	27,170,475
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.075.950.826</b>
		<b>Nilai evaluasi SAKIP SKPD</b>		BB	predikat	
		<b>Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	
1.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Kebutuhan honorarium pengelola keuangan, dan laporan	Dinas dan UPTD	12 1	Bulan laporan	500.000.000
2.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	Dinas dan UPTD	5	laporan	247,678,727
3.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	18 Kab/Kota	6	dokumen	200.000.000
4.	Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Honorarium Pengelola Aset	Padang	10	Orang	128,272,099
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja yang Berkompeten</b>		<b>42,36</b>	<b>%</b>	<b>5.660.027.000</b>
		<b>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi</b>		<b>15,43</b>	<b>%</b>	
1.	Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja UPTD BLK Padang Panjang	Jumlah pendidikan dan pelatihan	BLK Padang Panjang	160	orang	975.000.000
2.	Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja UPTD BLK Payakumbuh	Jumlah pendidikan dan pelatihan	BLK Payakumbuh	160	orang	975.000.000

1	2	3	4	5		6
3.	Akreditasi Pogram Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi programnya di Sumbar	18 kab/ kota	20	LPKS	270.060.000
4.	Pelatihan Motivasi berprestasi bagi usaha Produktif	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan	Padang	100	orang	288.000.000
5.	Pelatihan pemagangan Dalam Negeri	Jumlah Pendidikan dan pelatihan	Payakumbuh Kota Solok	32	orang	367.734.000
6.	Pelatihan Kewirausahaan Mandiri	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan	Padang	150	orang	378.000.000
7.	Pelatihan wirausaha baru produktif	Jumlah Pelatihan	Padang	75	orang	298,500.000
8	Uji sertifikasi kompetensi metodologi instruktur pelatihan	Jumlah instruktur yang mempunyai sertifikasi metodologi pelatihan	Padang	100	orang	617,194,000
9.	Penyiapan calon peserta magang ke Jepang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, pelatihan pra seleksi dan peserta seleksi pusat program magang ke jepang	Kab.Agam Kab.Pasaman, Kab.Pessel Kab.Solok Kab.TanahDatar Kota Bukittinggi Kota.Padang Pd.panjang, Kota. Pariaman Kota Solok	220 220 440	Orang Orang Orang	589.192.000
10	Monitoring Pelatihan ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jumlah LPK yang dimonitoring	18 Kab/Kota	13	BLK	180,430.000
11.	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Terdatanya kebutuhan pelatihan dalam negeri	Padang	6	Perusahaan	67.917.000
12.	Fokus Grup Diskusi pemagangan	Jumlah peserta Fokus Grup Diskusi	Padang	50	orang	250.000.000
13.	Pembentukan klinik produktivitas	Jumlah klinik produktifitas yang terbentuk	19 kab/kota	25	lembaga	150.000.000
14.	Pengukuran Produktivitas Makro	Jumlah buku laporan makro daya saing		1	dok	153.000.000
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN DIVERSIFIKASI USAHA</b>	<b>Persentase serapan tenaga kerja sektor formal</b>		<b>21,37</b>	<b>%</b>	<b>2.864.085.609</b>
		<b>Persentase serapan tenaga kerja sektor In formal</b>		<b>6,60</b>	<b>%</b>	
1.	Pengumpulan dan Pengelolahan Data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Jumlah buku data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	18 Kab/Kota	25	buku	100.000.000
2.	Pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri	Jumlah peserta sosialisasi, bimtek dan pembinaan	19 kab/kota	1000 100 50	Orang Orang orang	500.000.000

1	2	3	4	5		6
3.	Workshop dan monitoring penempatan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah peserta workshop dan monitoring	Padang dan	100 2	Orang Kali monitoring	400.000.000
4.	Pembinaan perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)	Jumlah peserta workshop	19 Kab/Kota	80	orang	225.000.000
5.	Pelayanan penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Jumlah peserta orientasi antar kerja daerah, jumlah petugas yang dibina, Laporan data lowongan kerja	19 Kab/Kota	50 50 1	Orang Orang Laporan	382.058.556
6.	Bimtek perantaraan kerja dan pembinaan antar perantara kerja	Jumlah peserta Bimtek	5 Kab/kota	50	Orang	200.000.000
7.	Pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha baru	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan	3 Kab/Kota	60	orang	257.027.053
8.	Perluasan kesempatan kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Jumlah peserta pelatihan	Kota Bukittinggi, Kota sawahlunto, Kota Pariaman	100	orang	150.000.000
9.	Penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada calon pencari kerja	Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan jabatan	13 Kab/kota	1.500	orang	150.000.000
10.	Pelayanan informasi pasar kerja (IPK) dan Bursa Kerja	Jumlah peserta Bimtek Petugas IPK dan BKK, event pameran pasar kerja	19 Kab/Kota	60 1	Orang event	500.000.000
	<b>PROGRAM PERLIDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial</b>		<b>3,03</b>	<b>%</b>	<b>1.534.588.451</b>
		<b>Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan</b>		<b>7,72</b>	<b>%</b>	
1.	Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/Kota dan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Terbentuknya dewan pengupahan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	7 Kab/kota	3	Kab/ko ta	200.000.000
2.	Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan/ kesehatan di Kab/kota	Jumlah perusahaan yang dibina	Padang Sijunjung Padang Panjang Payakumbuh	50	Prsh	85.000.000
3.	Bimtek Struktur Skala Upah	Jumlah peserta Bimtek struktur skala upah	Padang Sijunjung Padang Panjang Payakumbuh	60	Orang	150.000.000

1	2	3	4	5		6
4.	Bimtek tata cara pembuatan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah pengusaha yang dilatih	Padang Sijunjung Padang Panjang Payakumbuh	100	orang	200.000.000
5.	Pembinaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (Bipartit, Tripartit)	Pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Hubungan Industrial (HI)	17 Kab/Kota	50 5	Prsh Kab/kota	224.588.451
6.	Penilaian kondisi Hubungan Industrial di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang dinilai	17 Kab/Kota	75	Prsh	125.000.000
7.	Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang dibina	Kab/Kota	100	Prsh	200.000.000
8.	Verifikasi Serikat Pekerja (SP) /Serikat Buruh (SB) di perusahaan	Jumlah serikat pekerja (SP)/serikat buruh (SB) yang diverifikasi	Kab/Kota	25	SP/SB	150.000.000
9.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Perusahaan	Jumlah perusahaan yang dilakukan sosialisasi di bidang Hubungan Industrial	Padang	60	Prsh	150.000.000
10	Penyusunan Peraturan Gubernur di Bidang Hubungan Industrial dan pengawasan	Tersusunnya Pergub tentang Hubungan Industrial dan Pengawasan	Padang	1	pergub	50.000.000
<b>X</b>	<b>PROGRAM PERLIDUNGAN TENAGA KERJA DAN SISTEM PENGAWASAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan</b>		49,22	%	<b>2.137.213.511</b>
		<b>Persentase perusahaan melakukan SMK3</b>		11.32	%	
1.	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Per Undang-Undang Ketenagakerjaan	Pengawasan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban tenaga kerja di perusahaan	Bid.HI/Was UPTD Wil.I UPTD Wil.II UPTD Wil.III	200	Prsh	400.000.000
2.	Pemetaan status kerawanan perusahaan	Pengumpulan data tingkat kepatuhan perusahaan	19 kab/kota Jakarta	65	Prsh	100.000.000
3.	Penanganan Kasus Ketenagakerjaan	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan	Bid.HI/Was UPTD Wil.I UPTD Wil.II UPTD Wil.III	50	kasus	250.000.000
4.	Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) di perusahaan	Jumlah peserta pelatihan calon kader norma ketenagakerjaan (KNK)	Bid.HI/Was UPTD Wil.I UPTD Wil.II UPTD Wil.III	60	Orang	250.000.000
5.	Pembinaan dan Penilaian ke perusahaan dalam rangka pencapaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Award dan Zerro Accident	Jumlah perusahaan yang dibina dan di nilai dalam program K3	19 Kab/Kota	50	perusahaan	100.000.000
6.	Pembinaan penerapan sistem manajemen Keselamatan Kerja	Jumlah peserta pelatihan	4 Kab/Kota	75	Orang	150.000.000

	(SMK3) di perusahaan					
7.	Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja	Jumlah pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di Perusahaan UMKM	19 Kab/Kota	1.500 1000	Orang Sampel	200.000.000
8.	Pelatihan K3 umum dan tenaga medis bagi perusahaan	Jumlah pelatihan K3 Umum dan tenaga medis	Padang	30 30	K3 Umum Tenaga medis	180.000.000
9.	Peningkatan mutu Laboratorium	Kaji ulang manajemen, audit internal dan uji banding	Padang	1  1 1	Kaji ulang manajemen Audit internal Uji banding	70.000.000
10.	Gerakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah event yang dilaksanakan	Padang	1 100	Kegiatan prshn	150.000.000
11.	Peningkatan SDM UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pengawas Ketenagakerjaan	Jumlah peserta in house training untuk penguji K3	Padang	15	orang	137.213.511
12.	Pembentukan Panitia Pembina Kesehatan, Keselamatan Kerja (P2K3)	Jumlah perusahaan yang membentuk P2K3	19 Kab/Kota	75	Perusahaan	150.000.000
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM</b>	<b>Persentase perusahaan melakukan SMK3</b>		<b>11,32</b>	<b>%</b>	<b>323.153.680</b>
1.	Pemeliharaan alat laboratorium	Kalibrasi alat-alat laboratorium	Padang	5	unit	70.000.000
2.	Peningkatan saran dan prasarana laboratorium	Jumlah peralatan laboratorium yang di adakan	Padang	4	unit	253.153.000
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase retribusi perusahaan yang diperiksa</b>				<b>326.045.000</b>
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi	Jumlah pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan di perusahaan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah	19 Kab/Kota	50 3	Perusahaan Rumah dinas dan mess	326.045.000
<b>XIII</b>	<b>PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL</b>	<b>Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan/mengembangkan usaha ekonomi dan sosial budaya</b>		<b>40</b>	<b>%</b>	<b>1.293.314.630</b>
1	Penataan persebaran penduduk warga transmigrasi	Jumlah Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran antar Provinsi	2 Provinsi	2	Provinsi	100.000.000

2.	Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman (SP/KK) di kawasan transmigrasi yang dibina ekonomi dan sosial budayanya	Kab. Sijunjung	1	SP/ 120 KK	318.346.630
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Usaha di kawasan transmigrasi	Jumlah lembaga usaha yang terfasilitasi pengelolaan dan pengembangan usahanya	Kab.Pessel	8	Lembaga usaha	150.000.000
4.	Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi	Jumlah transmigran yang terlatih di kawasan transmigrasi	Kab.Pessel	180	orang	500.000.000
5.	Pembinaan potensi kawasan transmigrasi	Jumlah kabupaten yang berpotensi untuk kawasan transmigrasi	Kab.Pessel Kab. Sijunjung Kab. Pasbar Kab. 50 Kota Kab. Solse Kab. Pessel	6	kab	100.000.000
6.	Bimbingan pasca pelatihan transmigrasi	Jumlah transmigran yang mendapatkan bimbingan pasca pelatihan	Kab.Pessel Kab. Sijunjung	60	orang	125.000.000
		<b>Jumlah</b>				<b>21.305.999.999</b>

## **BAB IV P E N U T U P**

Rencana Kerja 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang disusun oleh organisasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Untuk Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dengan anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 21.305.999.999,-.

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
  - Dari hasil evaluasi capaian kinerja bahwa target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat pada Agustus 2018 mencapai 5,55 persen mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2017 sebesar 5,58 persen.
  - Kalau dilihat jumlah penduduk yang bekerja Agustus 2018 sebanyak 2.410.450 orang menurut lapangan pekerjaan utama naik di hampir seluruh sektor. Kenaikan tertinggi terjadi di sektor Lainnya (Pertambangan, Listrik, Gas dan Air) dengan penambahan 38,63 ribu orang (94,09 %) dan sektor industri sebanyak 59,98 ribu orang (41,06 %), sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang mengalami penurunan. Jumlah penurunan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian hanya sebesar 0,10 persen.
  - Di Bidang urusan Ketransmigrasian pada tahun 2018 telah dilakukan penempatan warga transmigrasi di lokasi Padang Tarok Kabupaten Sijunjung sebanyak 210 KK. Untuk menangani kesejahteraan dan permasalahan transmigrasi ini perlu dukungan semua pihak, seperti Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten, dan Lintas Sektor terkait.
- Kaidah – kaidah pelaksanaan

Agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerjasama antar berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk :

- Perbaiki perencanaan dan estimasi penggunaan anggaran sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
  - Koordinasi teknis dengan instansi terkait, perencanaan pengendalian dan pengawasan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, karena koordinasi secara tidak langsung dan mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat waktu.
  - Perlu dilaksanakan penangan program dan kegiatan secara terpadu sehingga dapat menghasilkan pekerjaan tepat sasaran dan tepat waktu.
- Rencana tindak lanjut
- Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan masyarakat Sumatera Barat, dengan melakukan pelatihan berbasis kompetensi dan dilanjutkan sertifikasi kompetensi kepada para tenaga kerja dan pencari kerja;
  - Meningkatkan kesempatan kerja dan memfasilitasi pemberian kemudahan kepada para pencari kerja dalam mengakses informasi pasar kerja, melalui pengembangan job fair dan bursa kerja on line;
  - Meningkatkan perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, dengan meningkatkan posisi tawar pekerja/buruh, sehingga sejajar dengan pengusaha dalam proses negosiasi Bipartit dan Tripartit;
  - Meningkatkan penegakan hukum ketenagakerjaan dengan melakukan pengawasan ketenagakerjaan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) secara komprehensif, dengan mengedepankan langkah-langkah persuasif sampai dengan melakukan penegakan hukum (law enforcement);
  - Meningkatkan kawasan transmigrasi dengan menyediakan permukiman transmigrasi yang berkualitas dan penyediaan permukiman transmigrasi yang layak huni.
  - Meningkatkan kemandirian transmigran dengan meningkatkan penghasilan KK transmigran melalui pelatihan terhadap warga transmigrasi

Padang, April 2019

KEPALA DINAS,

NAZRIZAL, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19700114 198902 1 001









